

FENOMENA MULTIKULTURALISME DALAM SEJARAH ISLAM KLASIK

Oleh:

Dudung Abdurahman

Dosen Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

Multiculturalism today become an issue and study materials are attractive for a wide range of knowledge about pluralism in the social order, including in relation to the lives of muslims. This study examines the relationship between Islam and multiculturalism, based on the premise that Islam as a system of doctrine that comes from God's revelation is always growing and developing appropriate socio-cultural context of its adherents, as shown in the history of the classical period. Therefore, the main problem of this study, how the life of multiculturalism in muslim society in that period. So the study aims to map patterns of multiculturalism within the Muslim communities. The research was developed by the historical method, with socio-cultural approach. Based on this study found patterns of multiculturalism as follows: *First*, the muslim community during the period of the Prophet and the Khulafa al-Rashidun-based Arab culture, and Islam is growing with the development pattern of teaching that accommodate the cultural forms that are rooted in the tradition of al-qabaliyyah al'ashabiyyah. *Second*, the pattern of growing muslim community in the politics of Arabism, as at the time of the Umayyad Daula, acculturation would encourage the growth of the Muslim-Arab Muslim communities against non-Arabs to the expansion of Islam during this time. *Third*, multiculturalism patterns more apparent as the reality of pluralism in Muslim society is indicated by the role of communities in the context of non-Arab Islamic culture and civilization construction, as developed Abbasid.

Keywords: *Multiculturalism, Muslim Community, Classical Islamic History*

Abstrak

Multikulturalisme dewasa ini menjadi isu dan bahan kajian yang menarik untuk pengetahuan tentang pluralisme dalam berbagai tatanan sosial, termasuk kaitannya dengan kehidupan umat Islam. Paper ini mengkaji hubungan Islam dan multikulturalisme itu, didasarkan pada alasan bahwa Islam sebagai sistem doktrin yang berasal dari wahyu Tuhan selalu tumbuh dan berkembang sesuai konteks sosial-budaya pemeluknya, sebagaimana ditunjukkan dalam sejarah periode klasik. Karena itu masalah utama

kajian ini, bagaimanakah kehidupan multikulturalisme dalam masyarakat muslim pada periode tersebut. Studi bertujuan memetakan pola multikulturalisme dalam komunitas-komunitas muslim itu. Adapun penelitiannya dikembangkan dengan metode historis dan pendekatan sosial-budaya. Berdasarkan kajian ini ditemukan corak multikulturalisme sebagai berikut: *Pertama*, komunitas muslim pada periode Nabi dan Khulafa al-Rasyidin berbasis kebudayaan Arab, dan Islam tumbuh dengan pola pengembangan ajarannya yang akomodatif terhadap bentuk-bentuk budaya yang berakar pada tradisi *al'ashabiyyah al-qabaliyyah*. *Kedua*, corak komunitas muslim yang berkembang dalam politik arabisme, sebagaimana pada masa Daulah Umayyah, justru mendorong pertumbuhan akulturasi muslim-arab terhadap komunitas-komunitas muslim non-Arab akibat perluasan wilayah Islam pada masa ini. *Ketiga*, corak multikulturalisme lebih nyata sebagai realitas pluralisme dalam masyarakat muslim ditunjukkan dengan peran komunitas-komunitas non-Arab dalam konteks pembangunan kebudayaan dan peradaban Islam, sebagaimana dikembangkan Dinasti Abbasiyah.

Kata Kunci: *Islam, Multikulturalisme, Komunitas-komunitas Muslim.*

A. PENDAHULUAN

Masalah multikulturalisme, yang secara umum berarti “pandangan atau faham akan keragaman budaya dan perilaku yang disebabkan perbedaan ras, agama, dan struktur sosial”, kini terus menjadi bahan kajian dan pembahasan dalam melihat berbagai tatanan sosial, termasuk juga kaitannya dengan perkembangan Islam. Maka hubungan Islam dan multikulturalisme itu merupakan masalah yang menarik untuk dikaji karena Islam sebagai sistem doktrin yang berasal dari wahyu Tuhan selalu berkembang dalam konteks keragaman pemeluknya, sehingga sejarah agama ini juga selalu menunjukkan perbedaan dalam pemahaman dan perilaku sosial-budaya pemeluknya itu.

Perkembangan Islam dan multikulturalisme sebetulnya telah berlangsung semenjak masa Nabi Muhammad saw., karena selain Islam pada masanya berhadapan dengan keragaman budaya masyarakat Arab, juga banyak cara yang dilakukan Nabi menyebarkan ajaran tauhid itu secara akomodatif dengan sistem budaya masyarakat tersebut. Demikian seterusnya proses multikulturalisme tumbuh dan berkembang hingga zaman keemasan Islam. Kajian masalah ini dilakukan terhadap gejala-gejala sejarah Islam pada periode klasik, yang diharapkan menjadi fenomena awal serta perspektif sejarah yang lebih fundamental untuk memahami Islam dan multikulturalisme.

Periode klasik dalam sejarah Islam bisa dikatakan sebagai periode pertumbuhan untuk sistem komunitas muslim. Konsepsi komunitas di sini adalah sama maksudnya dengan “*ummat*”, yakni pemeluk agama Islam dalam tatanan sosial dengan segala pranata dan struktur yang tumbuh di dalamnya menunjukkan identitas atas kesamaan kepercayaan, pandangan, dan perilaku masyarakat berdasarkan sistem ajaran Islam. Karena itu komunitas muslim mempunyai pemahaman, kepentingan, dan tujuan-tujuan politik yang dilakukan bersama, yakni oleh umat Islam dalam wilayah dan zaman tertentu.¹ Komunitas muslim pada masa Nabi Muhammad saw. sendiri mulai terbentuk dari kelompok kecil para penganut Islam pertama yang datang dari keluarga Nabi dan sejumlah anggota masyarakat dari berbagai latar etnis (*qabilah*) pada masyarakat Arab di Mekkah. Selama pembinaan Islam di sana sekitar 13 tahun, komunitas muslim sudah menunjukkan keragaman kultur, sehingga ajaran Islam pun telah mulai akulturatif dengan budaya masyarakat pemeluknya itu. Pada gilirannya dakwah Nabi di Madinah yang berlangsung sekitar 10 tahun, sistem komunitas muslim semakin terbentuk dalam keragaman kultur yang mulai meluas, sehingga pengembangan ajaran Islam semakin beriringan dengan tatanan komunitas yang mengakomodasi sejumlah kelompok, etnis, dan agama yang berbeda-beda.

Begitu selanjutnya pertumbuhan komunitas muslim pasca Nabi Muhammad saw. yang kemudian disebut sebagai periode Khulafa al-Rasyidin, selain dilatarbelakangi perubahan sistem sosial-politik pada masanya juga perkembangan komunitas muslim meluas dalam wilayah-wilayah etnis di jazirah Arab dan sekitarnya. Upaya Empat Khalifah pada periode ini menunjukkan perbedaan orientasi pengembangan Islam maupun kehidupan umatnya berhadapan dengan situasi masyarakat serta kebudayaan yang kompleks. Kemudian perkembangan umat Islam pada masa Daulah Umayyah di Damaskus (661-750) dan Daulah Umayyah di Andalusia (750-1031), kompleksitas masyarakat muslim kian meluas baik yang terjadi dalam pertumbuhan komunitas aliran-aliran keagamaan maupun komunitas muslim dalam wilayah-wilayah kebudayaan etnis yang beragam.

Kekhalifahan Umayyah di Damaskus memang mengembangkan politik arabisme, namun formalitas politik kebudayaan itu tidaklah serta merta menjadikan komunitas yang berbasis monokultur, melainkan kebudayaan Arab-muslim yang

¹ Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994). hlm. 27

bebasis kebudayaan etnis lokal, sehingga komunitas muslim berkembang dalam fenomena kebudayaannya yang bercorak multikultur pada lingkup hegemoni politik Arab. Dominasi politik Arab bagi pengembangan kebudayaan Islam itu sendiri pada masa ini mengalami keterbatasan, terutama pada segi interaksi Arab-muslim dengan kebudayaan masyarakat luar Arab, sehingga kecenderungan multikulturalisme masih bersifat endogen. Pada masa ini pertumbuhan multikulturalisme muncul di dalam komunitas muslim sendiri, baik terjadi atas keragaman aliran-aliran agama maupun terjadi dalam keragaman basis etnisitas Arab.

Multikulturalisme pada komunitas muslim menemukan coraknya yang bersifat eksogen pada masa Daulah Abbasiyah (750-1258). Periode ini menunjukkan multikulturalisme mulai berkembang melampaui batas-batas keragaman pada internal Arab-muslim, yakni keragaman budaya mereka juga terjadi karena interaksi dengan budaya luar Islam dan luar budaya Arab. Pada masanya kebudayaan Islam bergumul dalam hubungan-hubungan antara kebudayaan Arab dengan kebudayaan Persia, Romawi, dan India. Universalitas kebudayaan Islam didorong oleh keinginan para khalifah untuk memperkenalkan kebudayaan luar Arab ke dalam komunitas-komunitas muslim melalui penterjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berasal dari peradaban-peradaban besar itu. Kecenderungan multikulturalisme juga bertolak dari keterbukaan para khalifah untuk menerima pengaruh kebudayaan luar Arab, disamping itu keterlibatan masyarakat luar Arab sendiri bagi proses pembentukan serta pengembangan kebudayaan Islam.

Oleh karena itu kajian ini memfokuskan pembahasannya mengenai sistem komunitas muslim dan kehidupan multikulturalisme yang tumbuh dan berkembang pada periode klasik. Penelusuran masalah ini dipandu berdasarkan pertanyaan pokok sebagai berikut: bagaimanakah pola pembentukan serta pengembangan sistem komunitas muslim?; bagaimanakah kehidupan multikulturalisme pada setiap komunitas muslim?; dan mengapa terjadi keragaman dan perubahan multikulturalisme dalam komunitas muslim? Studi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kehidupan multikulturalisme dalam sistem komunitas muslim pada setiap episode sejarah Islam klasik tersebut, dengan target pencapaian pengetahuan sejarah di sekitar: bentuk-bentuk dan perkembangan komunitas muslim; pola-pola multikulturalisme dalam sistem komunitas muslim; dan faktor-faktor yang menyertai dinamika multikulturalisme pada setiap sistem komunitas muslim. Kajian ini diharapkan dapat melahirkan model baru

dalam historiografi Islam, juga dapat memberikan kontribusi bagi kelengkapan historiografi Islam pada umumnya, dan khususnya sebagai referensi tentang pembinaan umat Islam di tengah keragaman sosial dan budayanya.

Studi ini berdasarkan perspektif sejarah, yaitu penelusuri segala permasalahan serta penjabaran faktanya atas peristiwa-peristiwa masa lampau, yakni pada Sejarah Islam klasik. Namun penelusuran masalah sejarah ini lebih ditekankan pada fenomena sosial budaya, sehingga dalam pengkajiannya dipergunakan perspektif sosiologi dan kebudayaan. Berdasarkan pendekatan sosial di sini konsep komunitas dijadikan acuan utama, sedangkan berdasarkan perspektif kebudayaan itu konsep utama yang dijadikan acuan adalah konsep multikulturalisme. Sejumlah permasalahan sosial dan budaya dalam serjarah tersebut dianalisis secara *evolusioner* dan *komparatif* sekaligus, yakni dalam empat babakan sejarah Islam (masa Nabi, Khulafa Rasyidun, Daulah Umayyah, dan Daulah Abbasiyah). Dengan pendekatan tersebut, studi ini diarahkan kepada dua dimensi utama. *Pertama*, dalam dimensi sejarah dan perubahan, yakni upaya untuk memperhatikan pembentukan masyarakat Islam dan perubahannya sepanjang zaman klasik. *Kedua*, dengan dimensi analitis dan komparatif dalam memahami timbulnya keragaman budaya dalam sistem komunitas muslim.²

B. MULTIKULTURALISME PADA AWAL ISLAM

Terdapat berbagai pandangan ahli yang menggambarkan kondisi keyakinan yang dianut penduduk Arab pada masa sebelum kedatangan Islam. Seperti yang dikutip oleh Abdul Aziz, apapun pendapat para ahli, pada masa menjelang kedatangan Islam (masa jahiliyah), bahwa orang Arab digambarkan menganut beraneka agama dan kepercayaan. Di antara mereka ada yang mengimani Allah dan ke-Esa-an-Nya. Ada pula yang beriman kepada Allah sekaligus menyembah berhala dengan keyakinan bahwa berhala-berhala itu mendekatkan mereka kepada Allah. Tetapi ada juga yang semata-mata menyembah berhala dan menganggapnya sebagai pemberi manfaat serta rejeki dalam kehidupan. Di antara mereka ada yang memeluk agama Yahudi, Nasrani dan Majusi. Sebagian mereka tidak menentukan sikap, dan karena itu tidak mengimani apapun.

² Lapidus, Ira M.. *Sejarah Sosial Ummat Islam, 2 jilid*, Terj. Ghufron A. Mas'udi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. xi-xii.

Sebagian lagi meyakini hukum Tuhan hanya berlaku dalam kehidupan dunia dan tidak ada kehidupan setelah mati. Sementara itu sebagian mereka juga beriman kepada roh-roh dan menyembah benda langit.³

Masyarakat Arab pra Islam dikenal dengan kehidupan sosialnya dalam sistem *qabilah*. Ciri masyarakat keqabilahan tersebut, terutama dapat ditemukan pada masyarakat Arab di Mekah dan Madinah, dua kota yang memiliki kaitan historis sangat kuat dengan kelahiran Islam. Meskipun pada perkembangannya terjadi perubahan struktur sosial secara perlahan yang diakibatkan pengaruh faktor internal maupun eksternal, hal mana *qabilah* tetap merupakan unit politik utama di kedua kota itu. Hingga menjelang kedatangan Islam, tidak ditemukan kesatuan unit politik atau kelompok sosial antar *qabilah* yang bersifat terpusat di tingkat kota, baik di Mekkah maupun Madinah. Melalui *qabilah* itu, Nabi Muhammad juga memanfaatkannya sebagai sarana dakwah. Penyebaran ajaran Islam yang awalnya sembunyi-sembunyi dilakukan kepada keluarga dan kerabat terdekat. Nabi Muhammad saw. adalah anggota Bani Hasyim, suatu *qabilah* yang kurang berkuasa dalam Suku Quraisy, yang memegang jabatan *siqayah*. Muhammad lahir dari keluarga terhormat yang relatif miskin. Ayahnya bernama Abdullah anak Abdul Muthalib, seorang kepala suku Quraisy yang besar pengaruhnya. Ibunya adalah Aminah binti Wahab dari Bani Zuhrah. Tahun kelahiran Muhammad dikenal dengan nama tahun Gajah (570 M).

Dakwah Nabi Muhammad saw. pada awal kerasulannya memperoleh sambutan luas dari masyarakat lapisan bawah, terutama para budak. Hal ini mudah dipahami mengingat kondisi sosial mereka memang sangat membutuhkan pembebasan. Sebaliknya, sambutan dari masyarakat lapisan atas sangat sedikit, khususnya hanya datang dari istri Nabi, keluarga dan kerabat dekat saja. Tatkala Nabi Muhammad saw. berdakwah secara terbuka, yakni tiga tahun setelah kerasulannya, tidak banyak pemuka Quraisy yang bersedia menyambutnya. Bahkan, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasulullah. Semakin bertambahnya jumlah pengikut Nabi semakin keras tantangan dilancarkan kaum Quraisy.

Bagaimanapun, keselamatan Nabi Muhammad dan tugas awal kerasulan selama di Mekah sungguh tertolong oleh tradisi *al'ashabiyyah al-qabaliyyah*, yang berperan

³ Abdul, Aziz, *Chieftdom Madinah Salah Paham Negara Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabeta, 2011), hlm. 165

penting dalam menarik keluarga Bani Hasyim dan Bani Al-Muthalib untuk menjamin keselamatannya. Selama perlindungan kepadanya diberikan oleh anggota terkemuka Quraisy seperti Abu Thalib atau Khadijah, selama itu pula Muhammad aman dari upaya kekerasan fisik bukan hanya dari *qabilah* selain Quraisy, tetapi juga dari kalangan Quraisy sendiri. Di bawah naungan tradisi kekabilahan, hanya anggota sukunya sendiri yang berani menentang dengan cara-cara yang dapat diterima di dalam *qabilah* bersangkutan, dalam hal ini Quraisy, sementara *qabilah* lain tidak mungkin melakukan hal itu karena akan menimbulkan aksi balas dendam kekabilahan.⁴

Kekejaman yang dilakukan oleh penduduk Mekah terhadap komunitas muslim pada saat itu, mendorong Nabi Muhammad saw. untuk mengungsikan sahabat-sahabatnya ke luar Mekah. Permusuhan yang kian hebat antar *qabilah* menyebabkan kaum muslimin meninggalkan Mekah demi menyelamatkan diri. Bagi mereka yang tidak mempunyai *qabilah* pelindung, seperti para budak, mereka berhijrah ke tempat lain adalah jalan terbaik. Sejarah mencatat sebagian besar muslimin yang hijrah pertama kali ke Habsyi (Ethiopia) terdiri dari warga Mekah kelas bawah. Tetapi, hijrah yang fenomenal ke Yatsrib sekitar tahun 622 M. bukan hanya memberikan tempat aman bagi muslimin Mekah, tetapi juga menyatukan kekuatan elemen Quraisy dengan kekuatan elemen Arab terkemuka di kota itu yang selalu terlibat permusuhan, yaitu al-Aus dan al-Khazraj.⁵

Selain sebagai kota suci yang ditunjuk Allah SWT, keistimewaan Madinah bukan terjadi begitu saja, akan tetapi melalui proses transformasi sosial yang tidak sederhana. Setelah mengganti nama Yastrib dengan Madinah, Nabi kemudian melakukan pemetaan dan sensus penduduk. Barangkali ini merupakan sensus penduduk pertama di dunia. Dalam sensus tersebut ditemukan kenyataan bahwa Madinah adalah sebuah kota yang multikultural. Heterogenitas masyarakat kota Madinah dapat dilihat dari hasil cacah penduduk yang dilakukan atas perintah Nabi, yaitu dari 10.000 jiwa penduduk Madinah kala itu kaum muslim adalah minoritas yakni 1500 orang (15%). Mayoritas adalah orang musyrik Arab 4.500 orang (45%) dan orang Yahudi 4.000 orang (40%).⁶

⁴ Ibid., hlm. 214.

⁵ Ibid., hlm. 215

⁶ Sami bin Abdullah, al-Maghluts. *Al-Ayhlas At-Taikhi li Sirah ar-Rasul, Atlas Perjalanan Hidup Nabi Muhamamd.* (Jakarta: Al-Mahira, 2008), hlm. 95.

Tingkat heterogenitas ini lebih tinggi lagi manakala dipaparkan bahwa masing-masing kelompok Muslim, Musyrik Arab, dan Yahudi itu di dalamnya terdiri dari berbagai *qabilah* atau sub-kelompok. Kaum muslim sendiri terdiri dari dua kelompok besar Muhajirin (migran) dan Anshor (non-migran), yang masing-masing terdiri dari berbagai *qabilah* yang punya tradisi bermusuhan karena kuatnya akar sukuisme dalam masyarakat Arab. Meski begitu, uniknya kehidupan di Madinah dapat berlangsung dengan damai. Tidak mengherankan jika Madinah telah menjadi kota yang maju pada masa itu.

Nabi Muhammad saw. adalah tokoh yang patut dijadikan teladan dalam hal membumikan multikulturalisme. Ketika Nabi saw. hijrah ke Madinah, beliau mulai memimpin berbagai komunitas yang berbeda latar belakang agama, suku, politik yang disatukan dalam satu bingkai kepemimpinan agama sebagai payung hukum utama di atas tata sosial berdasarkan *qabilah* tertentu. Muhammad saw. adalah orang yang berhasil menjadi pemimpin seluruh komponen masyarakat. Di Madinah, berbagai budaya, agama dan aliran politik bisa disatukan sehingga kehidupan Madinah pada waktu itu dapat berlangsung damai. Muhammad saw. memimpin komunitas besar Yahudi yang banyak menguasai aspek ekonomi, politik dan kultur Madinah.

Nabi Muhammad saw. mampu menciptakan kedamaian di kalangan masyarakat multikultural dikarenakan beliau berhasil meletakkan dasar hubungan persahabatan yang baik dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Agar stabilitas masyarakat dapat diwujudkan, Nabi Muhammad mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka. Ikatan perjanjian itu dituangkan dalam sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas. Setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan. Kemerdekaan agama dijamin, dan seluruh anggota masyarakat berkewajiban mempertahankan keamanan negeri dari serangan luar. Dalam perjanjian itu jelas disebutkan bahwa Nabi Muhammad menjadi kepala pemerintahan karena sejauh menyangkut peraturan dan tata tertib umum, otoritas mutlak diberikan kepada beliau. Dalam bidang sosial, beliau juga meletakkan dasar persamaan antar sesama.⁷

⁷Badri Yatim. *Sejarah peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 26.

Dengan menempatkan semua manusia pada derajat yang sama, Islam hendak memberikan ruang dan kesempatan yang sama pada semua manusia. Semua manusia berhak eksis dengan keragaman budaya, adat, dan keyakinan masing-masing. Nuansa demokratis dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara menjadi ajaran yang sangat inheren dengan Islam. Nabi Muhammad saw. bersama para sahabatnya telah membangun Negara Madinah yang demokratis. Dalam pasal-pasal Piagam Madinah, misalnya, ditemukan spirit-spirit demokrasi yang mengental.

Refleksi multikultural yang terkandung dalam Piagam Madinah mengalami gejolak yang beragam. Kejelasan akan hak dan kewajiban muslim dan non-muslim mulai diporsikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya dalam dakwah Islam. Pada masa peperangan, tujuan dari gerakan milisi bukan hanya memerangi kaum Quraisy Mekah yang menentang Islam, namun juga sebagai bentuk perluasan kekuasaan Islam baik secara geografis maupun perluasan area dakwah. Maka dari itu, bukan hanya penduduk Mekah, namun semua kabilah Arab (non-muslim) terlibat permusuhan dengan Madinah baik langsung ataupun karena terikat dalam perjanjian.

C. MULTIKULTURALISME PADA MASA UMAYYAH

Sebagai dinasti pertama dalam Islam, Daulah Umayyah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan fondasi-fondasi kekuasaan Islam, khususnya dalam konteks pembangunan kebudayaan Islam. Telah umum diketahui bahwa Daulah Umayyah, khususnya yang berpusat di Damaskus terkenal dengan kebijakan Arabisasi. Namun, sebagaimana dijelaskan Gerald Hawting, arus “Arabisasi” tidak lebih dari sekedar konstruksi dan ekspansi kebudayaan yang ditandai dengan penggunaan bahasa Arab di seluruh wilayah kekuasaan Islam Daulah Umayyah saat itu. Meskipun seringkali diasosiasikan dengan arus *Islamisasi*, tetapi Arabisasi, lanjut Hawting, berbeda dengan Islamisasi. Perbedaan ini ditunjukkan oleh fakta bahwa beberapa komunitas, seperti golongan Yahudi dan Kristen tetap menjadi bagian penting dari kota Damaskus sejak dikuasai Daulah Umayyah. Baik golongan Yahudi maupun Kristen tetap mempertahankan tradisi keagamaan mereka meskipun mereka telah meninggalkan

bahasa sehari-hari yang mereka gunakan sebelum kedatangan Islam, dan menggantinya dengan bahasa Arab.⁸

Meskipun terkenal dengan kebijakan politik Arabisasi, heterogenitas sosial dan kultural telah terwujud di bawah kekuasaan Daulah Umayyah. Muslim-Arab mulai melakukan kontak budaya dengan berbagai peradaban dunia yang lebih tua, misalnya Persia dan Mesir, bahkan Eropa di semenanjung Iberia. Kondisi ini mendorong adanya saling-pinjam dan saling pengaruh-mempengaruhi antar entitas budaya. Proses akulturasi tentu tidak terlepas dari peran para khalifah Daulah Umayyah yang juga mendorong terjadinya akulturasi budaya tersebut. Aspek-aspek budaya yang paling menonjol dalam merepresentasikan bentuk-bentuk kreatif sebagai hasil dari silang-budaya di antaranya dalam aspek ilmu pengetahuan dan seni bangunan-arsitektural.

Fakta multikulturalisme pada masa ini juga dapat dilihat dari struktur sosial. Masyarakat di Damaskus terdiri dari empat komponen utama, yaitu bangsa Muslim-Arab, bangsa-bangsa Muslim non-Arab, bangsa-bangsa non-Arab, dan budak. Bangsa Muslim-Arab menempati kelas tertinggi dalam stratifikasi sosial di Damaskus, mereka adalah para elit penguasa Daulah Umayyah, baik dari keluarga kerajaan maupun kelompok aristokrat Arab. Pengeluaran negara untuk membiayai golongan teratas ini cukup tinggi. Ketika Khalifah al Walid I berkuasa, anggaran pemerintah untuk subsidi golongan atas yang berada di Damaskus mencapai 45.000. Sedangkan ketika Marwan I menjadi khalifah, kota Hims beserta distriknya menganggarkan dana sebesar 20.000 untuk biaya pensiun pada pejabat kekhalifahan. Meskipun menempati strata tertinggi dalam pelapisan sosial di kota Damaskus, bukan berarti golongan Muslim-Arab adalah golongan mayoritas. Philip K. Hitti mencatat bahwa meskipun Damaskus --sebagai ibu kota kekhalifahan Daulah Umayyah Timur-- telah bertransformasi menjadi sebuah kota dengan ciri khas Islam, secara umum penduduk Damaskus, bahkan hingga ke kota-kota kecil, pedesaan, dan daerah pegunungan, adalah penganut agama Kristen.

Dalam catatan sejarah, konflik antar agama dalam kehidupan sosial di Damaskus relatif tidak ditemukan. Konflik sosial yang ada hanya terjadi di antara beberapa suku. Dua suku yang seringkali terlibat dalam konflik adalah suku Himyariyah dan Mudariyah. Kerukunan antar umat beragama ini didorong oleh kebijakan

⁸ Hawting, G. R.. *The First Dynasty of Islam: The Umayyad Caliphate AD 661-750*. (Southern Illinois: Southern Illinois University Press 1987), hlm.8.

pemerintah Daulah Umayyah yang memiliki perhatian berimbang dan adil terhadap penganut agama lainnya. Para khalifah Daulah Umayyah memberikan perlindungan secara proporsional terhadap tempat-tempat suci agama-agama di Damaskus, seperti gereja, katedral, sinagoge, dan tempat suci lainnya. Pihak penguasa Daulah Umayyah bahkan pernah mengambil kebijakan perbaikan bangunan gereja Kristen di wilayah Edessa yang rusak karena bencana gempa bumi. Biaya rehabilitasi bangunan itu diambil dari dana yang dihimpun dari umat Islam.⁹

Terkait dengan eksistensi perempuan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus, hal tersebut memiliki relevansi tersendiri dengan nilai-nilai *kesejajaran* dalam konsep multikulturalisme. Secara umum, perempuan di Damaskus memang ditempatkan secara terpisah dengan laki-laki di ruang publik. Namun hal tersebut tidak berarti mendorong terjadinya diskriminasi dan penindasan. Bahkan perempuan-perempuan di Damaskus memiliki kesempatan dan akses yang sama dengan laki-laki, khususnya dalam pengembangan keilmuan dan pendidikan. Pihak Daulah Umayyah memberikan kebebasan kepada perempuan untuk mengembangkan minat dan hasrat mereka yang tinggi terhadap aktifitas di bidang pendidikan. Sejarah mencatat bahwa ada beberapa ilmuwan populer dari kalangan perempuan di Damaskus pada masa Daulah Umayyah, seperti Putri Husain dan Sakhina. Hal ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah Daulah Umayyah yang cenderung egaliter dan tidak diskriminatif, khususnya terkait dengan keberadaan dan peran perempuan di sektor publik.

Demikian pula dengan struktur masyarakat pada masa Umayyah di Andalusia. Komposisi penduduk Andalusia saat Daulah Umayyah berkuasa sangat beragam. Kelompok penduduk muslim utama yang berdiam diri di Andalusia adalah komunitas Muslim-Arab dan suku Berber. Keduanya merupakan aktor penting dalam proses pembebasan Andalusia untuk menjadi pusat kekuasaan Daulah Umayyah di Barat. Kelompok penduduk lainnya adalah komunitas Kristen sebagai penduduk asli Andalusia. Sebagian anggota komunitas ini ada yang kemudian memeluk Islam setelah pembebasan Andalusia dari penindasan bangsa Ghotia Barat. Komunitas Muslim-Arab yang menetap di Andalusia pasca pembebasan berasal dari wilayah selatan Arab (Suku Yamani) dan wilayah utara Arab (Suku Mudhari). Mayoritas Suku Mudhari mendiami

⁹ Kees De Jong. "Al Andalus di Bawah Kekuasaan Daulah Umayyah di Cordoba (756-1031): Suatu Masyarakat Pluralistik yang Beradab". (*Gema Teologia* (Jurnal Fakultas Theologia Universitas Kristen Duta Wacana). Vol. 34 No. 1 April 2010), hlm. 21.

kota Toledo, Saragosa, Sevilla, Valencia, dan lain-lain. Sementara itu, Suku Yamani kebanyakan menetap di Granada, Cordoba, Sevilla, Murcia, dan Badajoz.¹⁰

Baik komunitas Muslim-Arab, Kristen, maupun Yahudi memerankan peranan penting dalam perkembangan kebudayaan di kota Cordoba. Kolaborasi budaya antara Islam, Kristen, dan Yahudi merupakan salah satu identitas kebudayaan di Andalusia, khususnya kota Cordoba pada masa Daulah Umayyah. Khalifah Abdurrahman I bahkan menggunakan sebagian gereja Santo Vinsensius sebagai tempat ibadah umat Islam, sedangkan bagian gereja lainnya dipergunakan oleh komunitas Kristen. Hal tersebut merupakan simbol kerukunan antar-umat beragama di Andalusia. Komunitas Kristen tetap diperbolehkan menggunakan gereja-gereja mereka dan para pemuka agama Kristen tetap diizinkan untuk menggunakan pakaian keagamaan mereka.

Pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia juga mengeluarkan kebijakan yang mendorong terjadinya proses imitasi dan akulturasi budaya antara entitas sosial yang ada di Andalusia. Daulah Umayyah terkenal dengan kebijakan-kebijakannya yang sangat menghormati pemeluk agama non-Islam, khususnya Kristen dan Yahudi. Baik komunitas Kristen, Yahudi, maupun Muslim-Arab dapat berinteraksi secara bebas dan setara dalam aturan sosial yang berlaku. Khusus terhadap komunitas Kristen dan Yahudi, pemerintah Daulah Umayyah bahkan menempatkan keduanya ke dalam jabatan pejabat sipil maupun militer. Terhadap komunitas Kristen, pemerintah Umayyah memilihkan seorang pemimpin komunitas (*Count*) yang berasal dari anggota komunitas mereka sendiri. Komunitas Kristen juga memiliki perwakilan untuk menyampaikan aspirasi mereka di istana kekhalifahan Daulah Umayyah, sedemikian pula ihak Daulah Umayyah juga menunjuk orang tertentu sebagai pemungut pajak terhadap komunitas Kristen.¹¹

D. KOMUNITAS-MULTIKULTURALISME MASA ABBASIYAH

Situasi Irak pada umumnya dan Baghdad – sebelum Bani Abbasiyah berkuasa– pada khususnya telah memiliki tradisi tua dan realtif mapan. Dua tradisi besar sebelum Islam yaitu tradisi Romawi Timur (Bezantium) dan tradisi Persia telah tumbuh dan

¹⁰ Lapidus, Ira M.. *Sejarah Sosial Ummat Islam, 2 jilid*, Terj. Ghufron A. Mas'udi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 45.

¹¹ Kees De Jong. "Al Andalus di Bawah Kekuasaan Daulah Umayyah di Cordoba (756-1031): Suatu Masyarakat Pluralistik yang Beradab". (*Gema Teologia* (Jurnal Fakultas Theologia Universitas Kristen Duta Wacana). Vol. 34 No. 1 April 2010), hlm.50.

berakar kuat dalam kehidupan masyarakat di Irak. Budaya pra-Islam di wilayah yang dikuasai berlangsung dalam berbagai bidang seperti struktur keluarga dan ideologi patriarki, tatanan masyarakat pertanian, masyarakat pendatang, ekonomi pasar, dan beberapa ajaran monoteisme.¹² Di wilayah bekas imperium Romawi Timur tersebut juga berkembang tradisi Kristen Ortodoks; daerah lain seperti Abesinia dan Gassania beraliran Kristen Monofit; sedangkan di wilayah lainnya seperti Syiria dan Irak berkembang aliran Kristen Nestorian. Kenyataan ini menggambarkan Islam masa Dinasti Abbasiyah berhadapan dengan situasi keragaman baik keagamaan, ideologi, kebudayaan, maupun tradisi hirarkhis sosial di tengah masyarakatnya.

Kehidupan keagamaan di wilayah Dinasti Abbasiyah juga didukung oleh berbagai kelompok keagamaan lokal maupun pendatang. Agama yang dianggap sebagai pendatang yang masuk ke wilayah Persia adalah agama Buddha. Bahkan dalam perkembangannya keluarga Bani Abbasiyah membangun jalinan yang sangat intensif dengan satu keluarga Buddha, yaitu Barmaki.¹³ Keluarga Buddha yang pada akhirnya memeluk agama Islam ini mendapat kepercayaan penting dalam pemerintahan Bani Abbasiyah, yaitu sebagai gubernur dan menteri keuangan. Bahkan proses pendidikan khalifah Harun al-Rasyid dipercayakan kepada eks keluarga Bikhu Buddha ini. Meskipun pada akhirnya karena pertimbangan politik, keluarga Bikhu itu dimusnahkan oleh salah seorang khalifah dari Bani Abbasiyah.

Terhadap realitas masyarakat yang heterogen tersebut Ignasz Goldziher menggambarkan adanya dua faktor yang menjadikan tradisi Arab dan tradisi di luar Arab saling melengkapi satu sama lain sehingga menjadi sebuah formula baru. Dalam hal ini orientalis Barat tersebut menuliskan dinamika kebudayaan yang memproduksi formula budaya baru itu sebagai berikut: Dua macam pengaruh menentukan sejarah suatu institusi. Ada yang di antaranya bersifat internal: impuls-impuls yang berasal dari institusi itu, dan yang daya pendorongnya telah menggerakkan sepanjang perjalanan historisnya. Yang lain lagi ialah pengaruh-pengaruh intelektual dari luar, yang memperkaya dan mempersubur inti ide yang asli, sehingga telah melahirkan perkembangan historisnya. Akan tetapi, tahap-tahap paling penting di dalam sejarahnya

¹² Lapidus, Ira M.. *Sejarah Sosial Ummat Islam, 2 jilid*, Terj. Ghufron A. Mas'udi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 4.

¹³ Philip K. Hitti. *The History of The Arabs*. Terjemahan R. Cecep Lukman Hakim dan Dedi Slamet Riyadi. (Bandung: Serambi. 2008), hlm. 365-368.

ditandai oleh asimilasi dengan pengaruh asing. Perkembangan dogmatik Islam berlangsung menurut jejak alam pikiran Yunani; di dalam sistem hukumnya atas pengaruh hukum Romawi; organisasi kenegaraan seperti yang terbentuk semasa khaklifahan Abbasiyah menunjukkan adaptasi ide-ide politik Persia; dan ilmu tasawuf Islam menggunakan cara-cara berpikir Neoplatonisme dan Hindu.

Perekonomian masa Bani Abbasiyah di antara yang paling menonjol adalah perdagangan dan industri. Pada mulanya laju perdagangan dikendalikan oleh orang-orang Kristen, Yahudi, dan pengikut Zoroaster. Namun pada akhirnya laju perdagangan itu digantikan oleh orang Arab Islam, menjadikan pelabuhan-pelabuhan seperti Baghdad, Bashrah, Siraf, Kairo, dan Iskandariyah menjadi pusat perdagangan. Wilayah perdagangan yang dijelajahi para pedagang muslim pada masa itu meliputi Cina, Maroko, dan Spanyol. Di antara barang dagangan yang mereka bawa adalah kurma, gula, kapas, kain wol, serta peralatan dari baja dan gelas. Dari wilayah Asia mereka mengambil gading, kayu eboni, sedangkan dari Afrika mereka mengambil budak kulit hitam (Hitti, 2008: 428-430).¹⁴

Potret lalu lintas perdagangan masa Abbasiyah menjadi bukti bahwa kekhalifahan di Baghdad membangun relasi dengan berbagai kelompok masyarakat dari berbagai latar kalangan ideologi dan kebudayaan untuk satu tujuan kesuksesan dalam perdagangan. Kenyataan ini memungkinkan diterapkannya etika multikultural yang bisa disepakati oleh semua kalangan. Nilai Islam bukanlah satu-satunya nilai yang menjadi pertimbangan dalam membangun etika multikultural di kalangan masyarakat pedagang. Namun dengan berpijak pada latar belakang keagamaan yang berkembang di Persia sejak kuna sampai dengan kehadiran Islam, bisa diasumsikan bahwa etika yang mereka majukan dibangun di atas nilai-nilai keagamaan yang berkembang di Persia, seperti dari Yahudi, Kristen, Buddha, agama Persia Kuno, dan nilai etika agama Islam sendiri.

Meskipun Bani Abbasiyah memerintah dengan menyadarkan pada hukum Islam, namun tetap memberikan perlakuan yang bebas terhadap masyarakat setempat yang masih menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai lokal. Pendukung dari pelaku budaya lokal ini datang dari warga masyarakat yang disebut dengan *dzimmy*. Menurut Hitti, bahwa di kota maupun di desa, orang *dzimmy* berpegang teguh pada budaya dan

¹⁴ Philip K. Hitti. *The History of The Arabs*. Terjemahan R. Cecep Lukman Hakim dan Dedi Slamet Riyadi. (Bandung: Serambi. 2008), 428-430.

memelihara bahasa asli mereka, misalnya budaya dan bahasa Aram serta Suriah di Suriah dan Irak, budaya dan bahasa Iran di Persia, dan bahasa serta budaya Koptik di Mesir. Kebanyakan dari mereka yang masuk Islam kemudian pindah ke kota.¹⁵

Sementara itu potret bertahannya budaya lokal terlihat pada penggunaan bahasa asli masyarakat bersangkutan. Penggunaan bahasa Arab di kalangan masyarakat baru berjalan secara massif dan merata pada akhir pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Meskipun bahasa Arab pada masa itu dijadikan sebagai bahasa pengetahuan dan bahasa masyarakat, namun ia tidak pernah berhasil menggantikan bahasa Iran yang telah menjadi bahasa percakapan yang sudah mapan. Fenomena ini juga terjadi di kalangan Kristen Lebanon, bahwa bahasa Suriah asli menolak kuat pengaruh bahasa Arab.¹⁶ Fakta ini menunjukkan bahwa pengaruh budaya Arab – terutama bahasa Arab – tidak mampu mempengaruhi budaya lokal, dan budaya lokal bisa tumbuh secara leluasa.

Selain bahasa Arab tidak mampu menggantikan bahasa lokal, pada saat yang bersamaan dinasti Abbasiyah mengadopsi konsepsi, tradisi, dan kultur politik Persia. Fenomena ini menegaskan bahwa nilai-nilai Islam yang universal tetap mampu berdialog bahkan berkolaborasi dengan budaya setempat. Adopsi budaya setempat, terutama warisan raja-raja Sasania, menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan Dinasti Abbasiyah. Hal itu sebagaimana dituliskan Goldziher sebagai berikut: "di bawah Abbasiyah terlepas dari kegemaran mereka yang makin menjadi-jadi terhadap kemegahan dan kebesaran raja-raja Sasan, kata-kata kesalehan merupakan acara sehari-hari. Ideal pemerintahan Persia, yang menyatukan antara agama dan Negara, merupakan rencana Abbasiyah yang jelas" (Goldziher: 1991: 44).

E. PENUTUP

Fakta multikulturalisme dalam sejarah Islam klasik menampilkan coraknya yang beragam pada tiga perkembangan komunitas muslim. *Pertama*, periode awal Islam (masa Nabi dan Khulafa al-Rasyidin), komunitas muslim berbasis kebudayaan Arab, atau komunitas muslim yang berakar pada tradisi *al'ashabiyyah al-qabaliyyah*. Tradisi ini berperan penting dalam merintis pembentukan sistem komunitas muslim, baik untuk

¹⁵ Philip K. Hitti. *The History of The Arabs*. Terjemahan R. Cecep Lukman Hakim dan Dedi Slamet Riyadi. (Bandung: Serambi. 2008), hlm. 441.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 452.

penumbuhan struktur sosial maupun pengembangan kebudayaannya. Potensi sosial-budaya Arab bukan saja menjadi sasaran obyektif dalam penyatuan identitas komunitas muslim, melainkan hal itu juga terakomodasi dalam proses kehidupan mereka, sebagaimana tercermin dalam masyarakat Madinah serta pengaruhnya di wilayah-wilayah kekuasaan Islam.

Kedua, Pada masa daulah Daulah Umayyah, khususnya yang berpusat di Damaskus terkenal dengan kebijakan Arabisasi. Kebijakan Arabisasi --yang menekankan mono-kulturalisme-- justru merupakan anti-tesa dari multikulturalisme. Namun, kebijakan politik-administratif tersebut tidak serta-merta meniadakan co-eksistensi dan signifikansi peran komunitas-komunitas non-Arab dalam konteks pembangunan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa kekuasaan Daulah Umayyah di Timur maupun di Barat.

Ketiga, Pada masa pemerintahan Abbasiyah dilakukan proses penyadaran komunitas muslim pada hukum Islam, namun masyarakat setempat yang masih menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai lokal tetap diberi kebebasan. Pendukung budaya lokal datang dari warga masyarakat *dzimmi*, yaitu mereka masih berpegang teguh pada budaya dan memelihara bahasa asli mereka, sehingga keberadaan Bani Abbasiyah di bumi Persia berperan sebagai pengisi dan pelanjut sejarah peradaban Persia, tetapi Bani Abbasiyah selama berkuasanya juga menghasilkan peradaban baru baik di bidang ilmu pengetahuan, pembangunan etika, model pemerintahan, maupun seni dan sastra, yang semuanya dibangun atas basis multikultur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin., dkk. *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural*. Yogyakarta; IAIN Sunan kalijaga-Kurnia Kalam Se- mesta, 2002.
- Abdurahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- _____. *Komunitas-multikultural dalam Sejarah Islam Periode Klasik*. Yogyakarta: Ombak, 2014.

- Aziz, Abdul, *Chiefdom Madinah Salah Paham Negara Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabeta, 2011.
- al-Maghhluts, Sami bin Abdullah, *Al-Ayhlas At-Taikhi li Sirah ar-Rasul, Atlas Perjalanan Hidup Nabi Muhamamd*. Jakarta: Al-Mahira, 2008.
- Burke, Peter. *Sejarah dan Teori Sosial*, terj. Mestika Zed & Zulfami. Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Coope, Jessica A. "Religious and Cultural Conversion to Islam in Ninth-Century Umayyad Cordoba". *Journal of World History*, Vol. 4 No. 1 1993 University of Hawaii Press. 1993.
- De Jong, Kees. "Al Andalus di Bawah Kekuasaan Daulah Umayyah di Cordoba (756-1031): Suatu Masyarakat Pluralistik yang Beradab". *Gema Teologia* (Jurnal Fakultas Theologia Universitas Kristen Duta Wacana). Vol. 34 No. 1 April 2010
- Esposito, John L. *Islam dan Politik*, terj. HM. Joesoef Sou'yb. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Fauzi, Ihsan Ali. "Convivencia" di Andalusia. *Democracy Project*, Edisi 039 Desember 2011. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi.
- Hassan, Hassan Ibrahim. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, terj. Djahdan Humam. Yogyakarta: Kota Kembang, 1989.
- Hawting, G. R.. *The First Dynasty of Islam: The Umayyad Caliphate AD 661-750*. Suthern Illinois: Southern Illinois University Press. 1987.
- Hitti, Philip K. *The History of The Arabs*. Terjemahan R. Cecep Lukman Hakim dan Dedi Slamet Riyadi. Bandung: Serambi. 2008.
- Iqbal, Muhammad. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Lahore: SH. Muhammad Ashraf, 1971.
- Issawi, Charles. *Filsafat Islam tentang Sejarah*, terj. A. Mukti Ali. Jakarta: Tintamas, 1976.
- James C. Conroy. "Do the Andalusian Caliphates offer a good model for intercultural citizenship?". Makalah pada *Inaugural Conference of the Jubilee Centre for Character and Values* di Universitas Birmingham 2012. Tidak dipublikasikan.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pemikiran dan Perkembangan Hiostoriografi Indonesia Suatu Alternatif*. Jakarta: PT. Gramedia, 1982.
- _____. *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah*. Yogyakarta: Gadjah

- Mada University Press, 1980.
- _____. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia, 1992.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- _____, *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan, 1997.
- Lapidus, Ira M.. *Sejarah Sosial Ummat Islam, 2 jilid*, Terj. Ghufron A. Mas'udi. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Mahfud, Choirul. *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Maria Rosa Menocal. "Culture in the Time of Tolerance: Al-Andalus as a Model for Our time". *Occasional Papers*, Paper 1. http://digitalcommons.law.yale.edu/ylsop_papers/1.
- Pulungan, J. Sayuthi. *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sardar, Ziauddin. *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*, terj. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan, 1986.
- Shibel, Fuad Muhammad. *Kebudayaan Islam menurut Tinjauan Toynbee*, terj. Bustani A. Gani dan Chatibul Umam. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Shihab, Alwi. *Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1999.
- Von Grunebaum, Gustave E. *Modern: The Search for Cultural Identity*. New York: Ancore, 1964.
- Wahid, Abdurahman, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*. Depok: Desantara, 2001.
- Watt, W. Montgomery, *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*, terj. Hartono Hadikusumo. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- Yatim, Badri, *Sejarah peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.